BAB II

PERKAWINAN DAN *'URF* DALAM ISLAM

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Dalam kehidupan manusia pada umumnya pasti akan melalui suatu tahap di mana ia membentuk sebuah keluarganya sendiri melalui perkawinan. Melalui proses tersebutlah seseorang dapat memulai untuk mempunyai keluarga sendiri.

Perkawinan itu sendiri mempunyai arti penting baik bagi diri sendiri, maupun bagi masyarakat. Karena perkawinan mengakibatkan munculnya tatanan baru dalam masyarakat, dengan kata lain keluarga merupakan suatu komponen pembentuk masyarakat. Sebuah keluarga mempunyai andil terhadap cerminan masyarakat, seperti apa masyarakat pada suatu tempat, maka dari itu untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat atau struktur sosial yang baik demi terciptanya suatu keteraturan sosial diperlukannya suatu aturan yang mengatur tentang perkawinan dan keluarga.

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, baik dari segi budaya, suku, ras, dan agama, muncul suatu hukum yang berbeda-beda yang mengatur tentang perkawinan dan aturan-aturan lainnya yang berhubungan dengan keluarga. Khususnya agama yang menciptakan suatu aturan dalam mengatur hal tersebut.

1. Pengertian Perkawinan dan Hukum Melaksanakannya

Perkawinan merupakan penyatuan antara dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami istri, yang hubungan tersebut akan menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam satu keluarga.

Adapun menurut syara', perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dengan jalan yang legal dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera¹.

Salah satu ulama kontemporer Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamy* berpendapat bahwa perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.²

Perkawinan juga merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya ada dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

¹ M. A. Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 8.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 39.

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”.(QS. An-Nur: 32)³

Mengenai hukum melaksanakan perkawinan jika dilihat dari hakikatnya, perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan tersebut adalah *mubah* atau boleh.⁴

Hukum suatu perkawinan dapat dikatakan bisa berubah sesuai dengan keadaan pelakunya. Di antara beberapa hukum melakukan perkawinan adalah sebagai berikut:

a. *Wajib*

Perkawinan itu menjadi wajib hukumnya bagi orang yang telah mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjermus dalam perzinahan. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan kawin.⁵

Jika tidak segera melangsungkan perkawinan, besar kemungkinan dapat mendekati atau bahkan masuk ke dalam perzinahan. Hal ini merupakan sebab utama mengapa seseorang diwajibkan untuk melakukan perkawinan. Hanya dengan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 354.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 43.

⁵ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah VI*, Moh. Tholib (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 22.

perkawinan seseorang dapat melakukan hubungan badan dengan halal dan legal.⁶

Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 33 disebutkan:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ... ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehinggalah Allah memberikan kemampuan mereka dengan karunia-Nya ...”.(QS. An-Nur: 33)⁷

b. *Sunnah*

Hukum perkawinan itu menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari jasmaniahnya sudah memungkinkan untuk kawin, dan dari segi materi telah mempunyai jika hanya sekedar biaya hidup, maka bagi orang yang demikian itu sunnahlah baginya untuk kawin. Jika dia kawin akan mendapat pahala dan jika tidak maka tidak berdosa dan tidak mendapat apa-apa.⁸

c. *Haram*

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.⁹

Perkawinan juga dihukumi haram jika seseorang yang

⁶ Nasrul Umam Syafi’I, Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?* (Depok: Qultum Media, t.t.), 29.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, 354.

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997), 20.

⁹ M. A. Tihami, Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 11.

mengawini seorang perempuan hanya dengan maksud menganiayanya atau mengolok-oloknya saja, maka haramlah baginya untuk kawin. Begitupun jika seseorang baik laki-laki atau perempuan yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri dalam perkawinannya, sehingga membuat salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu menyebabkan perkawinan itu tidak dapat mencapai tujuannya.¹⁰

d. *Makruh*

Hukum menikah menjadi makruh bagi seseorang yang jika dipandang dari segi jasmaniahnya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga jika ia kawin hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruhlah baginya untuk kawin. Jika ia tetap melakukannya dia tidak berdosa dan juga tidak mendapat pahala, tetapi jika tidak maka ia akan mendapat pahala.¹¹

Para ulama dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa kawin itu hukumnya makruh bagi seorang yang tidak memiliki keinginan dan takut jika tidak mampu memenuhi

¹⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan ...*, 21.

¹¹ *Ibid.*, 20-21.

kewajibannya kepada istrinya.

Sedangkan Ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa kawin hukumnya makruh bagi orang-orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu menunaikan kewajibannya terhadap istrinya.

e. *Mubah*

Hukum melaksanakan perkawinan menjadi *mubah* bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan tertentu yang mewajibkannya untuk segera melaksanakan perkawinan.¹²

Kebolehan tersebut jika seseorang telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, minimal untuk melakukan akad. Perkawinannya juga merupakan ibadah dalam Islam. Perbuatannya untuk melangsungkan perkawinan meskipun dalam keadaan demikian itu halal baginya, maka menghalangi atau mencela perbuatan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kebolehan seseorang dalam melakukan perkawinan merupakan hak sepenuhnya, namun dari kebolehan itu tetap ada kewajiban yang harus dipenuhinya.¹³

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Karena rukun

¹² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 36.

¹³ Nasrul Umam Syafi'I, Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah ...*, 28.

dan syarat tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.

Adapun yang dimaksud dengan rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu tersebut termasuk dalam rangkaian ibadah tersebut.

Sedangkan pengertian dari syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tersebut tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.

Dan yang dimaksud dengan sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁴

Adapun beberapa rukun dalam perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali
- d. Saksi
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak harus disebut dalam akad perkawinan dan tidak harus diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat

¹⁴ M.A. Tihami, Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat ...*, 12.

perkawinan.¹⁵

Sedangkan beberapa syarat perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat sebagai calon suami:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Laki-laki
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat memberikan persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Syarat-syarat sebagai calon istri:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Perempuan
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuannya
 - 5) Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Syarat-syarat sebagai wali:
 - 1) Laki-laki
 - 2) Dewasa
 - 3) Mempunyai hak perwalian
 - 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Syarat-syarat saksi:
 - 1) Minimal dua orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam *ijab qabul*

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 61.

- 3) Dapat mengerti maksud akad
- 4) Beragama Islam
- 5) Dewasa

e. Syarat-syarat *ijab qabul*:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2) Adanya pernyataan menerima dari calon suami
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- 5) Orang yang terkait *ijab* dan *qabul* tidak sedang *ihram* haji atau umroh
- 6) Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.¹⁶

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'at.

¹⁶ Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 10.

Dalam hal ini Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan sebagai berikut:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluri sebagai manusia.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar rasa cinta dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari biaya penghidupan yang halal, dan menumbuhkan rasa tanggungjawab.¹⁷

Islam menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia, serta sarana untuk membina keluarga yang bahagia. Penghargaan Islam terhadap perkawinan sangat besar, hal ini dapat kita lihat bahwa sebuah ikatan perkawinan dalam Islam sebanding dengan menyempurnakan separuh agama.

Dalam buku lain juga dijelaskan mengenai beberapa tujuan dari sebuah perkawinan dalam Islam:

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia

Perkawinan adalah jalan yang sah untuk pemenuhan tuntutan naluri manusia. Perkawinan merupakan jalan untuk memastikan bahwa nafsu biologis manusia dapat disalurkan melalui jalan yang halal.

- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur

Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam

¹⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan ...*, 12-13.

Islam diantaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)¹⁸

Artinya: *Dari ‘Abdillah Ibn Yaryid berkata Rasulullah Saw bersabda : “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah, karena nikah itu akan lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. (HR.Bukhori)*

c. Untuk menegakkan rumah tangga yang Islami

Tujuan yang luhur dari sebuah perkawinan adalah agar suami istri melaksanakan syari’at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari’at Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang Islami hendaklah mengikuti ajaran Islam yang telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal, di antaranya yang sesuai *kafa’ah* (menurut konsep Islam) dan pasangan yang shaleh shalehah.

¹⁸ Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhory, *Shahih Bukhoriy*, juz V (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 117.

d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya adalah untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini terlihat bahwa sebuah rumah tangga juga merupakan salah satu lahan subur untuk beribadah dan beramal shaleh di samping ibadah dan amal-amal shaleh yang lain.

e. Untuk mendapatkan keturunan yang shaleh dan shalehah

Tujuan dari sebuah perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 72, yaitu:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفْبَابًا لِيُؤْمِنُوا وَيَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمْ وَيَكْفُرُوا ۗ

Artinya: *“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”*

(QS. An-Nahl: 72)¹⁹

Yang tak kalah pentingnya dalam sebuah perkawinan bukan hanya untuk memperoleh anak, tetapi berusaha membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencetak anak yang shaleh shalehah.²⁰

Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena akan

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 274.

²⁰ Wiwid Prasetyo, *Mengapa Rezekiku Melimpah Setelah Menikah?* (Yogyakarta: Real Books, 2011), 80-82.

berpengaruh positif, baik bagi pelakunya sendiri, maupun bagi masyarakat. Adapun hikmah perkawinan diantaranya:

- a. Perkawinan adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks. Dengan perkawinan jiwa menjadi tenang, mata lebih terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati sesuatu yang halal.
- b. Perkawinan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup bersama anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan seperti ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang akan menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak sehingga menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan lebih giat dalam bekerja karena rasa tanggung jawab dan kewajibannya sehingga ada dorongan untuk mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan untuk memenuhi segala kebutuhan. Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

- e. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.²¹

Perempuan bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, dan menyiapkan segala kebutuhan suaminya. Sementara itu suami bekerja dan berusaha mendapatkan penghasilan yang halal untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Dengan pembagian yang adil ini dan keduanya saling bertanggung jawab atas kewajibannya masing-masing, maka akan tercipta keluarga yang bahagia.²²

- f. Dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga, dan memperkuat hubungan kemasyarakatan.²³

- g. Manusia jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalnya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak yang shaleh merupakan amalnya yang tetap tertinggal meskipun dia telah mati. Hal ini sesuai pada hadis

Nabi yang artinya:

²¹ M.A. Tihami, Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat ...*, 19-20.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah VI ...*, 21.

²³ *Ibid.*, 21.

*“Apabila manusia telah meninggal dunia, putuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendo’akannya”.*²⁴

4. Larangan Perkawinan

Beberapa larangan perkawinan yang diatur dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan yang diharamkan dalam Islam

Ada beberapa bentuk perkawinan yang diharamkan dalam Islam, diantaranya:

1) Perkawinan *Mut’ah* (kawin kontrak)

Pengertian *mut’ah* secara etimologi berarti bersenang-senang atau menikmati. Kawin *mut’ah* disebut juga kawin sementara waktu atau kawin yang terputus.

Secara terminologi yaitu perkawinan yang dilaksanakan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu (kawin kontrak) atau akad perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan untuk waktu satu hari, satu minggu, atau satu bulan. Disebut nikah *mut’ah* karena dengan perkawinan tersebut laki-laki dapat menikmati sepuas-puasnya sampai saat

²⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 68-69.

yang telah ditentukan dalam akad.²⁵

Ada beberapa kriteria yang menjadikan sebuah perkawinan disebut perkawinan *mut'ah*, yaitu:

- a) *Ijab qabul* menggunakan kata nikah atau dengan kata *mut'ah*
- b) Tanpa wali
- c) Tanpa saksi
- d) Ada ketentuan dibatasi oleh waktu
- e) Tidak ada saling mewarisi antara suami istri
- f) Tidak ada talak.²⁶

Hukum perkawinan seperti ini oleh seluruh Imam Madzhab disepakati haram. Beberapa alasan yang menjadikan perkawinan *Mut'ah* haram adalah:

Pertama, perkawinan seperti ini tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan oleh al-Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah talak maupun iddah. *Kedua*, banyak hadits-hadits yang dengan tegas menyebutkannya haram. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang artinya:

“Wahai manusia! Saya pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah. Tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kemudian”. *Ketiga*, Umar

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 15.

²⁶ *Ibid.*, 16.

ketika menjadi Khalifah dengan berpidato di atas mimbar mengharamkannya dan para sahabatpun menyetujuinya. *Kempat*, Al Khattabi berkata bahwa haramnya kawin *mut'ah* itu sudah ijma', kecuali oleh golongan aliran Syi'ah. *Kelima*, kawin *mut'ah* sekedar bertujuan sebagai pelampiasan syahwat, bukan untuk mendapatkan anak ataupun memelihara anak yang keduanya merupakan maksud pokok dari sebuah perkawinan. Karena itu ia disamakan dengan zina jika dilihat dari segi tujuan yang semata-mata hanya untuk bersenang-senang.²⁷

2) Perkawinan *Tahllil*

Secara etimologi, yang dimaksud *tahllil* yaitu menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Jika dikaitkan dengan perkawinan yaitu perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan disebut dengan *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebut *muhallal lah*.

Dengan demikian perkawinan *tahllil* adalah perkawinan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dikawininya untuk dikawini lagi oleh bekas

²⁷ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah VI ...*, 58-59.

suaminya yang telah mentalak perempuan tersebut tiga kali, atau perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali pada istrinya dengan perkawinan yang baru.²⁸

Bila seseorang telah mentalak istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu waktu atau tidak, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu, kecuali jika bekas istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnyanya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ...

Artinya: “kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain... (QS. Al-Baqarah : 230)²⁹

Yang dimaksud kawin dengan suami lain dalam ayat tersebut bukan hanya sekedar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh telah melakukan hubungan intim sebagaimana kehidupan suami istri pada umumnya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *muḥallil* yang batal perkawinannya jika ia kawin dengan perempuan agar nantinya halal kembali bagi laki-laki bekas suaminya yang pertama, kemudian ditalaknya. Adapun jika saat ijab qabul ia tidak

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 36.

²⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, 36.

menyatakan maksudnya ini maka akad nikahnya sah.³⁰

Menurut mayoritas ulama, perkawinan *tah̄līl* hukumnya adalah haram (tidak sah), berdasarkan hadis Nabi bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menjadi *muḥallil* (orang yang disuruh kawin tahlil) dan *muḥallal lah* (orang yang merekayasa perkawinan *tah̄līl*).³¹

3) Perkawinan *Syighar*

Secara etimologi, kata *syighar* mempunyai arti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik. Jika dihubungkan dengan kata nikah dan disebut nikah *syighar* mengandung arti yang tidak baik, yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentun laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada mahar diantara keduanya. Adapun praktik perkawinan *syighar* hukumnya adalah haram.³²

b. Perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dikawini

Maksud dari larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah larangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki karena suatu sebab yang bisa menjadikan perkawinan tersebut tidak sah secara hukum.

Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 23 :

³⁰ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah VI ...*, 67.

³¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 17.

³² Ibid., 17.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya : *“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. (Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*(QS. An-Nisa’: 23)³³

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan menurut berlakunya terbagi menjadi :

1. Mahram *Muabbad*

Mahram *muabbad* yaitu orang-orang yang haram dinikahi untuk selamanya.

Ada tiga sebab yang menjadikan mahram *muabbad*:

³³ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya ...*, 81.

a. Adanya hubungan nasab (kekerabatan)

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya yang disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu
- 2) Anak perempuan
- 3) Saudara perempuan kandung
- 4) Bibi dari pihak ayah
- 5) Bibi dari pihak ibu
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan kandung.

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki di bawah ini :

- 1) Ayah
- 2) Anak laki-laki
- 3) Saudara laki-laki kandung
- 4) Paman dari pihak ayah
- 5) Paman dari pihak ibu
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
- 7) Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung.

b. Adanya hubungan *Muṣāḥarah* (perkawinan)

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh

seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *Muṣāḥarah* diantaranya:

- 1) Perempuan yang dikawini oleh ayah (ibu tiri)
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu)
- 3) Ibu dari istri (ibu mertua)
- 4) Anak dari istri.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *muṣāḥarah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *muṣāḥarah* sebagai berikut:

- 1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya (ayah) atau neneknya (kakek)
- 2) Ayah dari suami (mertua)
- 3) Anak-anak dari suaminya atau cucunya
- 4) Laki-laki yang pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

c. Adanya hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu pada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut

menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya, anak tersebut sudah seperti anaknya sendiri. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusukan kepada ibu tersebut, yang selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab³⁴.

Larangan perkawinan karena susuan sama halnya dengan larangan karena nasab sebagaimana sabda Nabi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ
مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ (رواه ابن ماجه)³⁵

Artinya: Dari Aisyah berkata: *“Rasulullah Saw bersabda diharamkan pernikahan karena susuan sebagaimana diharamkan karena nasab.”*
(HR.Ibnu Majah)

Wanita-wanita yang diharamkan untuk dikawini karena adanya hubungan sesusuan adalah:

- 1) Ibu Susuan, yaitu wanita yang pernah menyusui seorang anak yang dianggap seperti ibu kandung. Karena dengan air susu dapat menjadi darah dan daging dalam pertumbuhan seorang yang telah disusui.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...*, 110-114.

³⁵ Abu Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwainiy, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 607.

- 2) Nenek susuan, ibu dari wanita yang telah menyusui atau ibu dari suami wanita yang telah menyusui
- 3) Bibi susuan, saudara perempuan ibu susuan atau saudara suami dari ibu susuan
- 4) Kemenakan perempuan susuan, anak perempuan dari saudara sesusuan
- 5) Saudara susuan perempuan

Ulama berbeda pendapat mengenai kadar susuan yang menyebabkan terlarangnya perkawinan. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa hal ini tidak ada kadar batasan tertentu, bagi mereka berapapun kadarnya tetap menjadikan keharaman, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta pengikutnya. Sedangkan fuqaha lain yang menentukan batas kadar yang menyebabkan keharaman terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa satu atau dua kali sedotan tidak menyebabkan keharaman, tetapi yang menyebabkan keharaman adalah tiga kali sedotan keatas. Kelompok kedua berpendapat yang menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan. Sedangkan kelompok ketiga berpendapat yang menyebabkan keharaman adalah sepuluh kali susuan.³⁶

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz II, Cct. X (Beirut: Dar Kutub al-

2. Mahram *Mu'qqat*

Perempuan yang haram dinikahi selamanya menunjukkan bahwa tidak akan ada peluang lagi untuk menikahnya. Sehingga tidak boleh meminang mereka selamanya. Sedangkan perempuan yang haram *mu'qqat* menunjukkan masih ada harapan menikahi mereka apabila penyebab yang mengharamkannya sudah tidak ada, karena penyebab dilarangnya tersebut hanya bersifat sementara.

Adapun mahram *mu'qqat* mencakup beberapa perempuan berikut:

- a. Memadu dua orang perempuan bersaudara dalam satu perkawinan
- b. Seorang perempuan yang masih berstatus sebagai istri sah dari pria lain
- c. Perempuan yang sedang ihram
- d. Perempuan budak
- e. Perempuan pezina
- f. Perempuan yang masih dalam masa iddah (*al-mu'taddah*)
- g. Perempuan musyrik
- h. Perempuan yang telah dilamar oleh pria lain (*al-mukhtubah*).³⁷

Islamiyah, 1988), 35.

³⁷ Bahirul Amali Herry, *Kupinang Engkau dengan Al-Qur'an* (Jogjakarta: DIVA Press, 2013),

B. Adat Istiadat (*'Urf*) dalam Hukum Islam

1. Pengertian *'Urf*

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat”, dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut sebagai sebuah tradisi.³⁸

Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan tradisi.

Kata *'urf* juga mempunyai arti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.³⁹

2. Macam-Macam *'Urf*

Menurut Al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *'Urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:

- a. Dari segi obyeknya *'urf* (adat istiadat) dibagi pada *al-'urf al-lafzî* (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-'amali* (adat istiadat/ kebiasaan yang berbetuk perbuatan).

165-174.

³⁸ Ensiklopedi Islam, Jilid I, Cet. III (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 21.

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 128.

- 1) *Al-‘urf al-lafẓī* adalah sebuah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.
 - 2) *Al-‘urf al-‘amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.
- b. Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi dua, yaitu *al-‘urf al-‘ām* (adat yang bersifat umum) dan *al-‘urf al-khāṣ* (adat yang bersifat khusus).
- 1) *Al-‘urf al-‘ām* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
 - 2) *Al-‘urf al-khāṣ* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’, ‘urf dibagi dua yaitu *al-‘urf al-ṣaḥīḥ* (adat yang dianggap sah) dan *al-‘urf al-faṣīd* (adat yang dianggap rusak).
- 1) *Al-‘urf al-ṣaḥīḥ* adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan as-Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

- 2) *Al-‘urf al-fasīd* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.⁴⁰

3. Syarat-Syarat ‘Urf

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat bagi *al-‘urf* yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:

- a) ‘Urf itu harus termasuk ‘urf yang *shahīh* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur’an dan as-Sunnah.
- b) ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
- c) ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada ‘urf itu sendiri.
- d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan ‘urf.⁴¹

4. Kehujjahan ‘Urf

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *‘urf ṣahīh* sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyah dan Hanabilah.⁴²

Al-‘Urf ṣahīh harus dipelihara oleh seorang Mujtahid dalam

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. II (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

⁴¹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Ed. 1, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), 156-157.

⁴² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. II (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan Syari'at Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul membuat kaidah “adat kebiasaan itu merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum.”⁴³

Sedangkan mengenai *'Urf Fasīd* tidak harus dipertahankan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.⁴⁴

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara' dilandaskan pada:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.

(QS. Al-A'raf: 199).

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah, maka ayat tersebut difahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁴⁵

Landasan yang kedua adalah ungkapan dari sahabat Abdullah

⁴³ Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Citra Media, 1997), 147.

⁴⁴ Ibid., 148.

⁴⁵ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh ...*, 155-156.

bin Mas'ud, yaitu:

”Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di masyarakat Muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari'at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*, salah satunya adalah العادة محكمة ما لم يخالف النص (adat kebiasaan dapat menjadi hukum).⁴⁶

⁴⁶ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*, 212-213.